

Urgensi Menavigasi Prakarsa-Prakarsa Universitas dalam Merespons Polikrisis dan Mempromosikan Demokrasi Inklusif

Pidato Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UGM ke-69

19 September 2024

Disusun oleh:

Prof. Dr. Suharko, S.Sos., M.Si.

Kuskridho Ambardi, PhD.

Dr. A.B. Widyanta, M.A

Rizqyansyah Fitramadhana, S.Sos

Fariz Azhami Ahmad

Yogyakarta
2024



"The tyranny of a prince in an oligarchy is not so dangerous to the public welfare as the apathy of a citizen in a democracy"
—Montesquieu (*Spirit of the Laws*, 1748) —

"Life is dear to every living thing; the worm that crawls upon the ground will struggle for it."
— Solomon Northup (*Twelve Years a Slave*, 2013) —

Hadirin Sekalian yang berbahagia

Banyak kalangan mengkaji secara serius, intensif, dan persisten tentang krisis multi dimensi yang tengah melanda dunia sekurangnya dua dekade terakhir. Konflik geopolitik, ketegangan ekonomi, pecahnya kohesi sosial, dan memburuknya ekologi menunjukkan peningkatan risiko global yang semakin mencemaskan. Krisis yang berpotensi menjadi kronis dalam beberapa dekade mendatang.¹ Setelah lolos melewati darurat pandemi global oleh invasi zoonosis Covid 19 selama dua tahun, masyarakat dunia kini dibayangi oleh serangkaian tantangan serius jangka panjang, yang kini sering disebut sebagai "risiko sistemik global". Sekalangan cerdas cendekia menengarai bahwa kesaling-terkaitan risiko-risiko yang rumit dan kompleks dalam sistem global itu akan terakumulasi menjadi *global polycrisis*. Secara konseptual, polikrisis (*polycrisis*) itu merujuk pada gambaran krisis makro yang mondial, yang bersumber dari aneka kegagalan yang saling berhubungan. Jika tak terkendali, polikrisis itu akan mendegradasi masa depan kemanusiaan.²

Setidaknya terdapat lima sifat dari polikrisis yang terjadi di level mondial saat ini: 1). Jaringan yang sangat kompleks dan dinamis dari berbagai penyebab yang berkombinasi; 2) Hubungan sebab-akibat yang non-linier, dengan berbagai keseimbangan, titik kritis yang tidak dapat diprediksi, dan *hysteresis* (sifat dari sebuah sistem yang gagal untuk kembali ke keadaan sebelumnya, setelah penyebab dari perubahan tersebut dihilangkan); 3). Proses kausal yang melintasi batas unit administratif dan politik, sektor sosial, dan disiplin ilmu dan yang beroperasi pada berbagai skala waktu di seluruh sistem alam, sosial, dan teknologi; 4). Kecenderungan untuk menghasilkan "*black swan*" (peristiwa langka yang berdampak besar, sulit diprediksi dan di luar perkiraan standar); dan 5). Ketidakpastian yang mendalam tentang konsekuensi akhir dari polikrisis.³

¹ William R. Thompson. (2020). *Power Concentration In World Politics: The Political Economy of Systemic Leadership, Growth, and Conflict*. Cham: Springer Nature Switzerland AG.

² Homer-Dixon, T., Renn, O., Rockstrom, J., Donges, J. F. and Janzwood, S. (2021). *A Call for An International Research Program on the Risk of a Global Polycrisis* (Cascades Institute), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4058592>

³ O. Renn et al. (2019). *Things are Different Today: The Challenge of Global Systemic Risks*. *Journal of Risk Research* 22 (4), 401-415. <https://doi.org/10.1080/13669877.2017.1409252>.

Polikrisis global dengan risiko sistemik tersebut tidak dapat dikelola tanpa pemahaman yang memadai tentang kompleksitas sistem global yang terus berkembang. Pengelolaan atas itu mensyaratkan dua hal fundamental berikut ini: *pertama*, keahlian transdisipliner yang handal dalam menakar relasi risiko antar sistem; dan *kedua*, kepemimpinan yang terfokus, tegas, dan konsisten mengembangkan dan menegakkan pengaturan atas risiko-risiko sistemik dalam jangka panjang (simak gambar usulan kerangka analisis *polycrisis* dalam *endnote*).⁴

Menilik situasi global terkini, setidaknya terdapat lima krisis yang mendesak untuk direspon dan dicarikan solusi secara kolegal-kolektif oleh para pemimpin, pakar, dan akademisi. **Pertama**, ancaman resesi ekonomi dunia sebagai bagian dari polikrisis,⁵ yang mencakup problem utang publik yang meningkat drastis khususnya pasca pandemi Covid-19.⁶ **Kedua**, ancaman peperangan antara Rusia dan Ukraina yang menjadi proxy Amerika dan Eropa, ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Asia Timur, konflik Israel-Palestina, dan Iran-Israel.⁷ **Ketiga**, ancaman regresi demokrasi yang panjang dan mendalam akibat eksesifnya politik populisme dan politik identitas, serta bangkitnya kekuatan-kekuatan non-demokratis (militer dan milisia).⁸

Keempat, disrupsi sosial yang dipicu sekaligus diawetkan oleh inovasi teknologi digital. Disrupsi itu mewujud dalam beragam kasus dan terekam dalam sejumlah ungkapan seperti *digital authoritarianism*, *flexploitation*, *digital crime*, *cyber insecurity*, *misinformation*, *disinformation*, *hoax*, *hate speech*, dan *bullying*. Disrupsi itu memunculkan ketercabikan kohesi sosial sosial, merosotnya kualitas kehidupan sosial, dan keterancaman keselamatan manusia.⁹ **Kelima**, eskalasi

⁴ Berikut ini adalah usulan kerangka analisis polycrisis dalam Homer-Dixon, T., Renn, O., Rockstrom, J., Donges, J. F. and Janzwood, S. (2021). A Call for An International Research Program on the Risk of a Global Polycrisis (Cascades Institute), <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4058592> hal. 6.

⁵ Barrett, P. Das, S. Magistretti, G. Pugacheva, E. Wingender, P. (2021). After-Effects of the COVID-19 Pandemic: Prospects for Medium-Term Economic Damage (IMF Working Paper). Washington DC: IMF.

⁶ Chang, L., Mohsin, M., & Iqbal, W. (2023). Assessing the nexus between COVID-19 pandemic-driven economic crisis and economic policy: lesson learned and challenges. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(9), 22145-22158.

⁷ Eder, T. (2023). Trends in International Politics 2024. Vienna: Austrian Institute for International Affairs; Markitantov, V., Vinnichuk, O., Grubi, T., Rybshchun, O., & Chabanov, V. (2023). Global trends in world politics as a limitation of the foreign policy maneuvers of the state. *Research Journal in Advanced Humanities*, 4(1). <https://doi.org/10.58256/rjah.v4i1.1247>

⁸ Edward Aspinall and Eve Warburton.(2018). Indonesia: The Dangers of Democratic Regression. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, volume 129. Atlantis Press; Dirk Tomsa and Narissa Bax (2023) Democratic Regression and Environmental Politics in Indonesia, *Asian Studies Review*, 47:4, 740-760.

⁹ Janna Anderson and Lee Rainie. (2023). As AI Spreads, Experts Predict the Best and Worst Changes in Digital Life by 2035 in [pewresearch.org/internet](https://www.pewresearch.org/internet).

cuaca ekstrim adalah risiko terbesar yang merepresentasikan krisis ekologi global saat ini. Berbagai aktivitas perekonomian konvensional yang ekstraktif telah memicu risiko sosial ekologis. Laju dan percepatan degradasi ekosistem, keanekaragaman hayati, dan krisis iklim secara radikal mengancam kelestarian sistem planet Bumi.¹⁰

Bagaimana gelombang polikrisis global itu terjadi juga dalam lanskap “*imagined community*” bernama I-N-D-O-N-E-S-I-A? Dengan menimbang tren global, pertanyaan pokok ini dipecah lagi ke dalam dua pertanyaan utama berikut: **pertama**, bagaimana *polycrisis* itu telah dan sedang terjadi di Indonesia dalam rentang dua dekade terakhir? **Kedua**, bagaimana para akademisi di universitas ikut bertanggungjawab dan menavigasi berbagai prakarsanya dalam mensolusikan *polycrisis* tersebut?

Dengan menggunakan kerangka paradigma dan perspektif demokrasi inklusif dari Takis Fatopoulos (1997), tulisan ini menyodorkan posisi argumen bahwa akar masalah dari polikrisis yang terjadi di Indonesia saat ini adalah konsentrasi kekuasaan (*power concentration*) di berbagai arena kehidupan berbangsa dan bernegara. Membuncahnya berbagai skandal di Indonesia saat ini mengindikasikan semakin kuatnya otokrasi di lini-lini politik, ekonomi, sosial, dan ekologis.¹¹ Atas urgensi itulah, tulisan ini mempromosikan pentingnya demokrasi inklusif sebagai prakarsa politik kewargaan kampus.

Polikrisis di Indonesia

Dari berbagai komponen polikrisis yang bisa dilacak perwujudannya di Indonesia, yang terasa mendesak belakangan ini adalah komponen **pertama**, yakni krisis demokrasi.

Sejak Reformasi, demokrasi di Indonesia berkembang dengan baik. Beberapa prinsip penting demokrasi seperti pemilihan umum yang rutin dilakukan selama lima tahun sekali, eksistensi lembaga legislatif dan yudikatif sebagai pengontrol eksekutif, lembaga peradilan yang independen, dan kebebasan berekspresi dan berpendapat eksis sebagai tanda penting bahwa semua elemen menghormati dan menjalankan sistem demokrasi. Namun, dalam perjalanannya, demokrasi Indonesia justru mengalami kemunduran. Lima tahun belakangan ini, lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi aktor penting pelaksanaan demokrasi justru melakukan manuver-manuver hukum dan politik

¹⁰ World Economic Forum. (2024). The Global Risks Report 2024: Insight Report. Geneva: WEF.

¹¹ Secara definitif, pemusatan kekuasaan atau otokrasi (*autocracy*) merupakan “sistem pemerintah negara, wilayah, atau masyarakat yang diperintah oleh satu orang atau sekelompok kecil orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tak terbatas”. Lihat Cambridge Dictionary, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/autocracy>

yang berlawanan dengan nilai dan prinsip demokrasi. Pada tahun 2017, ketika isu intoleransi mengemuka di ruang publik, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Aturan itu memungkinkan pemerintah membubarkan organisasi masyarakat sipil yang dinilai berlawanan dengan Pancasila, satu langkah yang bagi banyak orang merupakan upaya melawan iliberalisme dengan cara iliberal.¹² Artinya, alih-alih menggunakan cara-cara demokrasi seperti diskusi atau berdebat untuk melawan iliberalisme, pemerintahan Jokowi justru memilih menyingkirkan lawan politiknya dengan strategi iliberal, yakni memusnahkannya dari gelanggang kompetisi politik.¹³

Dua tahun setelahnya, atau tepatnya pada tahun 2019, DPR mengesahkan KUHP yang sangat berlawanan dengan salah satu nilai dan prinsip vital demokrasi, yakni kebebasan berekspresi. Pasal 217-240 dan Pasal 256 memuat ketentuan mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dan Lembaga Negara yang berpotensi membatasi kritik terhadap pejabat negara dan mengatur tentang hukuman pidana bagi siapa saja yang melakukan demonstrasi tanpa pemberitahuan.

Setelah mencampuradukkan kritik dan penghinaan, elit partai politik yang menduduki jabatan-jabatan penting di DPR memanfaatkan hak serta wewenangnya untuk merumuskan, membahas, dan mengesahkan UU Cipta Kerja yang sangat merugikan kelas pekerja. Legalisasi aturan itu memungkinkan pengusaha membelejeti hak-hak dasar pekerja, mempraktikkan *easy hiring-easy firing*, dan menormalisasi pekerja kontrak. Selain substansi peraturan yang sangat bermasalah, proses perumusan dan pembahasan peraturan itu tidak menjunjung tinggi nilai demokrasi, yakni partisipasi publik yang berarti karena mengabaikan keterlibatan dari kelas pekerja sebagai pihak yang paling terdampak.

Menjelang pemilihan presiden, publik dikejutkan oleh langkah Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan atas pengujian pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membuka peluang bagi capres/cawapres berusia minimal 40 tahun atau pernah/sedang menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pilkada maju dalam pemilu 2024. Berkat keputusan itu, Gibran Rakabuming Raka bisa maju sebagai calon wakil presiden menemani Prabowo Subianto. Keputusan itu sangat kontroversial sebab ada indikasi terjadinya konflik kepentingan karena Ketua MK

¹² Marcus Mietzner. (2018). "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia." *Pacific Affairs* 91(2):261–82. doi: 10.5509/2018912261

¹³ Nava Nuraniyah. (2021). "Kaum Muslim Yang Terbelah: Pluralisme Militan, Polarisasi, Dan Kemunduran Demokrasi." Pp. 113–40 in *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* Jakarta: KPG dan Public Virtue.

pada saat itu, yaitu Anwar Usman, mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming Raka.

All in all, aneka ilustrasi regresi demokrasi di Indonesia tersebut bukanlah fenomena yang tiba-tiba terjadi. Senarai kasus yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa pembegalan demokrasi merupakan proses yang panjang dan diorkestrasi menggunakan cara sistematis. Parahnya, penghianatan terhadap nilai dan prinsip demokrasi dilakukan oleh aktor-aktor yang sudah sepatutnya menjadi tulang punggung demokrasi itu sendiri. DPR yang semestinya berperan sebagai garda terdepan pengontrol eksekutif justru menjadi alat untuk mengebiri kepentingan rakyat. Di lanskap hukum, hakim MK dan MA yang seharusnya menjunjung tinggi independensi serta ketegasan malah menjadi teater persekongkolan antara eksekutif dan yudikatif. Di tempat lain, lembaga penegak hukum yang seharusnya menegakkan supremasi hukum justru digunakan untuk menyandera suara-suara kritis masyarakat atas nama harmoni, stabilitas politik, dan pencemaran nama baik. Sementara itu, presiden Joko Widodo sebagai eksekutif tampak lebih sibuk mengamankan posisinya setelah tidak lagi menjabat dengan cara mendapuk anggota keluarganya menjadi pemimpin politik daripada memikirkan keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Kedua, disrupsi teknologi. Perkembangan teknologi dan informasi memaksa berbagai negara dan pemerintah menyesuaikan diri. Merespons perkembangan tersebut, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perindustrian, meluncurkan program *Making Indonesia 4.0*. Secara konseptual, program tersebut dibuat untuk mempercepat proses adaptasi Revolusi Industri 4.0 di berbagai sektor industri. Dalam kerangka Revolusi Industri 4.0, program itu menjadi basis serta landasan Indonesia guna menanggapi kehadiran *Artificial Intelligence (AI)*, *Internet of Things (IoT)*, dan proses digitalisasi. Sementara itu, dari sisi penyediaan infrastruktur, keseriusan pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan pelaksanaan program Bakti Kominfo yang bertujuan memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia. Sampai sejauh ini, program Bakti Kominfo telah berhasil membangun 4.343 infrastruktur teknologi dan informasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak berhenti di situ, melalui kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di bawahnya, Pemerintah Jokowi gencar mempromosikan wacana dan praktik yang berhubungan dengan AI, IoT, dan proses digitalisasi.¹⁴

Gegap gempita dan glorifikasi teknologi digital di atas sering membuat kita lupa bahwa perkembangan digital dan teknologi tidak berlangsung dalam konteks yang netral, tanpa kepentingan, dan tanpa prahara. Pada ranah politik, misalnya, media sosial menjadi sumber masalah polarisasi. Pada gelaran

¹⁴ Heru Nugroho, Arie Sujito, Andreas Budi Widyanta, and Gregorius Ragil Wibawanto. (2019). "Membongkar Delusi Subyek-Subyek Algoritmik Dalam Masyarakat Digital: Prospek Emansipasi, Keadilan, Dan Inklusi Sosial Dalam 'Ruang Kecepatan.'" Sosiologi UGM.

pemilihan gubernur Jakarta tahun 2017 ketika media sosial digunakan sebagai medium kampanye pemenangan calon, yang terjadi adalah polarisasi antar pendukung politik, mereka yang mendukung calon gubernur tertentu melabeli pendukung lain sebagai "liyan".¹⁵ Parahnya, polarisasi yang awalnya hanya berputar di ihwal politik malah justru menyeberang ke dimensi sosial, menyebabkan friksi berkepanjangan antara satu individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan presiden pada tahun 2019. Lagi-lagi, *modus operandi* yang digunakan oleh mesin partai politik untuk memenangkan kandidatnya tak jauh beda: menggambarkan lawan sebagai entitas demonik yang harus disingkirkan dengan cara melabelinya sebagai musuh.¹⁶ Kali ini label yang digunakan adalah "cebong" dan "kampret". Sama seperti kejadian sebelumnya, pembelahan yang awalnya hanya bersirkulasi pada lingkaran politik justru berakhir pada level sosial.

Selanjutnya, pada lanskap ekonomi, disrupsi digital memungkinkan kehadiran *financial technology* (*fintech/tekfin*). Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, perkembangan layanan jasa tekfin di Indonesia berlangsung dengan sangat pesat. Laporan yang diterbitkan oleh AC Ventures dan Boston Consulting Group pada tahun 2023, misalnya, menemukan bahwa jumlah perusahaan tekfin di Indonesia meningkat enam kali lipat dari 51 pada tahun 2011 menjadi 334 pada tahun 2022.¹⁷ Skema pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan tekfin menjangkau berbagai dimensi kehidupan, seperti konsumsi sehari-hari, belanja barang sekunder dan tersier, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendadak.¹⁸ Dengan persyaratan yang sangat mudah dan pencairan yang sangat cepat, perusahaan tekfin berhasil membuat masyarakat Indonesia, khususnya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, menjadi semakin aktif mengambil kredit. Sayangnya, karena kurangnya informasi, miscalculasi, dan permainan dari platform pemberi pinjaman, pada saat memutuskan mengambil pinjaman banyak orang yang tidak sadar terhadap persyaratan pinjaman, khususnya yang berhubungan dengan keamanan data pribadi, tingkat suku bunga, dan model penarikan angsuran. Hasilnya, banyak peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran atau bahkan gagal bayar. Akibatnya, aset atau barang berharga lainnya mesti dijual untuk menutupi bunga yang terlampaui tinggi. Apabila mereka telat membayar hutang, senarai kejadian tak menyenangkan seperti

¹⁵ Wasisto Raharjo Jati. (2022). "Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 26(2):152. doi: 10.22146/jsp.66057.

¹⁶ Achmad Nurmandi Salahudin, Hasse Jubba, Zuly Qodir, Jainuri, and Paryanto. (2020). "Islamic Political Polarisation on Social Media During the 2019 Presidential Election in Indonesia." *Asian Affairs* 51(3):656–71. doi: 10.1080/03068374.2020.1812929.

¹⁷ Arif Perdana. (2023). "'Fintech' Tak Hanya Pinjol: Mengenal Teknologi Finansial Dan Potensi Risikonya Di Indonesia." *The Conversation Indonesia*.

¹⁸ Brett Christophers. (2020). *Rentier Capitalism: Who Owns the Economy, and Who Pays for It?* London New York: Verso; Costas Lapavistas. (2013). *Profiting without Producing: How Finance Exploits Us All*. [US and CA version]. London: Verso.

ancaman *doxing* data pribadi, teror tak berkesudahan lewat telepon atau bahkan kiriman makanan, sampai didatangi oleh *debt collector* (DC) juga kerap terjadi.¹⁹ Semua hal itu akhirnya bermuara pada rusaknya kondisi mental peminjam karena perasaan takut dan khawatir imbas dari model penarikan pinjaman yang sangat tidak manusiawi. Beberapa berhasil lepas dari jerat "lintah darat" tersebut, beberapa yang lain harus rela meregang nyawa karena merasa tidak ada jalan keluar.

Hadirnya perubahan digital juga membawa permasalahan pada bidang ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perubahan sistem organisasi kerja. Satu contoh nyata dari proses transformasi organisasi kerja itu adalah pengorganisasian kerja pada perusahaan platform digital *ride-sharing* seperti Uber atau Gojek. Dalam sistem aktivitas ekonominya, Uber dan Gojek memperlakukan pengendara sebagai "mitra" alih-alih sebagai pekerja. Dampaknya mudah ditebak: karena berdiri pada posisi yang setara, Uber dan Gojek merasa tidak memiliki kewajiban untuk melindungi pengendaranya melalui skema asuransi. Ketika pengendara mengalami depresiasi kesehatan atau kecelakaan, maka Uber atau Gojek bisa lolos dari kewajiban penjaminan jaring pengaman seperti yang melekat pada perusahaan lainnya.²⁰ Sementara itu, strategi *gaming* yang diberlakukan oleh perusahaan *ride-sharing* juga membuat pengendara tereksplorasi secara maksimal.²¹ Sistem bonus yang memungkinkan pengendara naik kelas, dengan iming-iming mendapatkan orderan lebih jika berhasil sukses meraih peringkat tertentu, banyak memanipulasi "mitra" untuk terus bekerja tanpa batasan.²² Sayangnya, ketika pengendara berambisi menaikkan peringkatnya, algoritma aplikasi kadang malah mempermainkan alokasi pesanan kepada pengendara lain.²³ Hal ini memunculkan frustrasi berkepanjangan bagi pengendara.

Di sisi yang lain, menjamurnya model kerja "*freelance*" juga menimbulkan masalah yang tak kalah pelik. Tanpa skema kerja yang jelas, pekerja lepas sering mengalami pemutusan kerja sama semena-mena, keterlambatan pembayaran, dan memburuknya kondisi kesehatan karena mengejar batas waktu pengerjaan proyek. Situasi semacam itu sering ditemukan pada pekerja lepas yang bergerak

¹⁹ Fanny Novika, Nika Septivani, and I. Made Indra. (2022). "Pinjaman Online Ilegal Menjadi Bencana Sosial Bagi Generasi Milenial." *Management Studies & Entrepreneurship Journal* 3(3):1174–92.

²⁰ Arif Novianto, Anindya Dessi Wulansari, and Ari Hernawan. (2021). "Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol." *The Conversation Indonesia*.

²¹ Heru Nugroho, Andreas Budi Widyanta, Gregorius Ragil Wibawanto, and Rizqyansyah Fitramadhana. (2024). Proliferasi pemikiran sosial kritis. Sleman: Penerbit PT Kanisius.

²² Anggalih Bayu Muh. Kamim and M. Rusmul Khandiq. (2019). "Mitra Pengemudi Gojek dalam Jeratan Ekonomi Berbagi Melalui Platform." *Jurnal Studi Pemuda* 8(1):57. doi: 10.22146/studipemudaugm.45240.

²³ A. Wicaksono, (2023). "Gamifikasi Dan Bentuk Baru Eksploitasi Dalam Ekonomi Berbagi Pada Sistem Kerja Gojek." Pp. 37–55 in *Kapitalisme Digital dan Ekonomi Berbagi*. Yogyakarta: Kanisius.

di bidang kreatif seperti digital, media, dan film. Kajian yang dilakukan oleh Sindikasi pada tahun 2021 dan 2022 menyingkap bagaimana pekerja kreatif mengalami eksploitasi, kerentanan, dan kesulitan membangun serikat.²⁴ Temuan itu menandakan bahwa di tengah narasi fleksibilitas yang sering digaungkan oleh pelaku "freelance" dan industri yang mengandalkan tenaga-tenaga lepas, eksploitasi sejatinya masih tetap terjadi. Layaknya pengendara Uber dan Gojek, pekerja digital juga mengalami *flexploitation*; pekerja tidak lagi diatur oleh jam kerja yang ketat sehingga terlihat bebas memilih waktu pengerjaan tugasnya, namun dibalik itu mereka harus merelakan beberapa hak pekerjaannya hilang.²⁵ Kecenderungan untuk menyerahkan beberapa proses kerja pada tenaga lepas itu lambat laun mulai merambah ke sektor lainnya, salah satunya pendidikan tinggi. Di banyak universitas di Indonesia, produksi pengetahuan dan jasa konsultasi penelitian banyak dijalankan oleh enumerator dan asisten peneliti yang namanya kadang tak pernah muncul atau bahkan tak terlihat. Kendati terkesan *invisible*, merekalah kaum *cognitive proletariat* (*cognitariat*) yang tenaganya diperas habis-habisan atas nama efisiensi dan efektivitas proyek; mereka adalah kelompok pekerja yang mesti menerima model *plug-in* dan *plug-out*, dipakai ketika sedang dibutuhkan lalu dibuang saat pekerjaan sudah selesai.

Ketiga, krisis lingkungan. Indonesia sudah, sedang, dan akan menghadapi berbagai degradasi ekologi yang disebabkan oleh karsa pertumbuhan (*the will to improve*).²⁶ Sifat karsa pertumbuhan yang terlalu mengutamakan pada akselerasi ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial membawa dampak masif kepada kondisi sebuah wilayah. Di beberapa daerah yang lokasinya berdekatan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau kegiatan ekstraktif lainnya, bencana ekologis sudah mulai banyak bermunculan. Bencana ekologis itu hadir dalam berbagai bentuk, bergantung dengan konteks geografi dan aktivitas ekonomi yang dijalankan di wilayah tersebut. Di Morowali, tempat sentral pertambangan nikel di Indonesia, kerusakan lingkungan sudah terjadi secara masif.²⁷ Penelitian yang dilakukan oleh berbagai pihak menemukan bahwa air dan sungai di sekitar perusahaan mengalami kondisi cemar dan mengandung

²⁴ Fathimah Fildzah Izzati, Rara Sekar Larasati, Ben K. C. Laksana, Rio Apinino, and Kathleen Azali. (2021). *Pekerja Industri Kreatif Indonesia: Flexploitation, Kerentanan, Dan Sulitnya Berserikat*. Jakarta: SINDIKASI dan FNV Mondiaal; Liem, Windy, Wisnu Prasetya, Citra Maudy, and Sammy Irooth. 2021. *Kerja Layak: Survei Tentang Kondisi Pekerja Media Dan Industri Kreatif Di Indonesia*. Jakarta: SINDIKASI dan FNV Mondiaal.

²⁵ Fathimah Fildzah Izzati. (2020). "Informalisasi Kerja Dan Kerentanan Para Pekerja Industri Kreatif Dalam Flexploitation Dan Gig Economy." Pp. 65–87 in *Ekonomi Informal di Indonesia: Tinjauan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan*. Jakarta: Trade Union Right Centre.

²⁶ Suharko. (2024). *Sosiologi Lingkungan Hidup: Perkembangan, Teori, dan Area Kajian*. Yogyakarta: UGM Press.

²⁷ Faqihah Muharroroh Itsnaini and Hilda Alexander. (2024). "Transisi Energi Di Morowali Dan Beban Kerusakan Lingkungan." *Kompas*.

logam.²⁸ Hal itu membuat penduduk sekitar harus mencari air di tempat yang jauh dari rumahnya. Selain itu, pencemaran air itu juga mengganggu kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan karena air limbah dari pertambangan nikel menyebabkan banyak ikan mati.²⁹ Alhasil, nelayan tidak bisa lagi melaut yang mengakibatkan pundi-pundi mereka menurun.

Di tempat lain, pelaksanaan PSN yang dikerjakan oleh pemerintah pusat meninggalkan efek ekologis kepada masyarakat setempat. Ekstensifikasi aktivitas PLTU di Kabupaten Cilacap, contohnya, menciptakan konsekuensi kesehatan yang buruk. Menurut laporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, penambahan kapasitas PLTU memperparah kondisi kesehatan pernafasan penduduk di sekitar operasi PLTU Cilacap. Secara khusus, LBH menemukan banyak warga sekitar PLTU yang terkena penyakit pernafasan segera setelah PLTU Cilacap memperbesar kapasitas produksinya. Berdasarkan data pemeriksaan di Puskesmas Kesugihan, pada 2016 terdapat 10.481 warga terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), dengan rincian 6.721 jiwa pengidap baru dan 3.760 jiwa pengidap lama. Pada tahun 2017, terdapat 8.681 jiwa pengidap ISPA dengan rincian 6.069 jiwa baru dan 2.612 jiwa pengidap lama. Hingga Juni 2018, terdapat 3.360 jiwa warga terkena ISPA, terdiri dari 2.241 jiwa pengidap baru dan 1.119 jiwa pengidap lama. Program PSN lainnya seperti pembangunan bandara, pelabuhan, dan jalan tol juga menghasilkan jejak lingkungan yang negatif. Proses pembangunan jalan tol Yogya-Bawen dan Yogyakarta-Solo, contohnya, menggunakan tanah urug ilegal yang diambil dari wilayah warisan geologi Sleman. Dampak yang ditimbulkan dari penggundulan itu adalah hilangnya mata air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat dan pendangkalan sungai juga terjadi akibat endapan lumpur.³⁰

Ragam degradasi lingkungan di atas membuat kita mesti melakukan refleksi: apakah bencana-bencana ekologi itu merupakan harga yang pantas dibayar demi mengejar kemakmuran ekonomi? Apabila pengorbanan itu diterabas atas nama ekonomi, utamanya untuk pembukaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, kita wajib bertanya siapa yang paling diuntungkan dari sektor ekstraktif dan PSN ini? Ekonomi ekstraktif adalah sektor yang tidak

²⁸ Muhammad Sibgatullah Agussalim, Ariana Ariana, and Ramlah Saleh. (2023). "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Nikel di Kabupaten Kolaka Melalui Pendekatan Politik Lingkungan." *Palita: Journal of Social Religion Research* 8(1):37–48. doi: 10.24256/pal.v8i1.3610; Sulteng, WALHI. 2024. "Sungai Sekitar Tambang Dan Industri Nikel Di Morowali Terpapar Kandungan Logam." Retrieved September 7, 2024 (<https://walhisulteng.org/sungai-sekitar-tambang-dan-industri-nikel-di-morowali-terpapar-kandung-an-logam/>); Nurhayati Syarifuddin. (2022). "Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali." *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman* 1(2):19–23.

²⁹ Nurhayati Syarifuddin (2022). "Pengaruh Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Lingkungan Maritim di Kabupaten Morowali." *Jurnal Riset & Teknologi Terapan Kemaritiman* 1(2):19–23.

³⁰ Tempo. 2024. "Kerusakan Lingkungan Akibat Proyek Strategis Nasional Jokowi." *Tempo*.

bisa menjangkau banyak pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan gender. Artinya, tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya. Data dari BPS mendokumentasikan bahwa dari seluruh angkatan kerja, sektor ekstraktif (pertambangan dan penggalian) hanya menyerap 1,22 persen pekerja. Di saat yang sama, kita bisa melihat dengan gamblang siapa jaringan aktor yang terlibat dalam usaha ekonomi ekstraktif dan PSN tersebut. Berdasarkan penelusuran Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), perusahaan-perusahaan yang aktif bergerak di sektor pertambangan dan PSN dimiliki langsung oleh penguasa atau dipunyai oleh oligarki yang koneksinya dengan penguasa tampak begitu dekat. Dari kaca mata ekonomi politik, strategi pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada kegiatan ekstraktif dan sektor jasa jelas tidak inklusif. Dengan *spillover economy* yang teramat kecil dan struktur profesi yang elitis, profit dari aktivitas pertambangan hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil individu yang, karena kekuatan ekonomi dan politiknya, mampu mengontrol kebijakan dan peraturan untuk kepentingan pribadi.

Keempat, merosotnya kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya kelas pekerja dan kelompok miskin ekstrem. Dalam empat tahun terakhir, semakin banyak data atau tulisan yang membahas dan mengkonfirmasi tentang menurunnya performa ekonomi Indonesia.³¹ Data dari BPS, contohnya, menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia mengalami kecenderungan tren penurunan dari tahun 2019. Pada tahun 2019, terdapat 57,33 juta jiwa angkatan kerja yang berada pada level kelas menengah, angka itu turun menjadi 53,83 juta pada tahun 2021.³² Di sisi yang lain, jumlah penduduk menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) justru bertambah. Tahun 2022, jumlah kelompok ini mencapai 128,85 juta jiwa, lalu naik menjadi 136,92 juta pada tahun 2023 dan naik kembali menjadi 137,5 juta jiwa pada tahun 2024.³³ Artinya, berdasarkan data itu, ada indikasi bahwa kelas menengah di Indonesia banyak yang turun menjadi penduduk menuju kelas menengah. Pada sektor industri, kebijakan ekonomi yang tidak memihak pada industri manufaktur mengakibatkan deindustrialisasi prematur.³⁴ Pada taraf selanjutnya,

³¹ Jahen Rezki, Teuku Riefky, Faradina Alifia Maizar, Muhammad Adriansyah, and Difa Fitriani. (2024). *Rentannya Mesin Pertumbuhan Ekonomi. Indonesia Economic Outlook Triwulan-III 2024*. Jakarta: LPEM FEB UI; Arief Anshory Yusuf and Zuzy Anna. (2022). "The Perfect Storm That May Last Long: The Impact of COVID-19 on Income Inequality in Indonesia." in *Implications of COVID-19 on Economic Inequality in Asia*. India: Bloomsbury.

³² Qonita Azzahra. (2024) "Calon Kelas Menengah Di 2023 53,4%, Ekonomi Indonesia Rentan." *Tirto.id*.

³³ Qonita Azzahra. (2024). "Calon Kelas Menengah Di 2023 53,4%, Ekonomi Indonesia Rentan." *Tirto.id*.

³⁴ Muhtar Habibi. (2016). *Surplus Pekerja Di Kapitalisme Pinggiran: Relasi Kelas, Akumulasi, Dan Proletariat Informal Di Indonesia Sejak 1980-An*. Cetakan pertama. Serpong, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.

deindustrialisasi itu menyebabkan jumlah lapangan kerja formal menurun karena adanya PHK atau penutupan pabrik manufaktur. Fenomena itu bisa dilihat secara jelas ketika banyak pabrik tekstil dan garmen di Jawa Tengah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran dan penutupan operasi di beberapa daerah imbas kebijakan ekspor tekstil Kementerian Perdagangan.

Kondisi runyam juga ditemukan di ranah ketenagakerjaan. Sejak tahun 2019, lapangan kerja di Indonesia justru didominasi oleh sektor informal daripada sektor formal. Data Sakernas BPS menunjukkan bahwa pada periode tersebut, jumlah penyerapan kerja di sektor formal hanya 2.000.000, sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor informal mencapai 80.000.000. Tren itu jelas sangat mengkhawatirkan sebab sektor informal tidak menawarkan upah dan kondisi kerja yang layak.³⁵ Yang lebih menjengkelkan lagi, hingga saat ini belum ada langkah pasti dari pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut dengan memperluas lapangan kerja di sektor formal.³⁶ Sebaliknya, melalui kebijakan UU Cipta Kerja, pemerintah pusat malah mengamplifikasi sektor informal ketimbang mengembangkan sektor formal. Pasal 90 (B) ayat 1 menyebutkan bahwa ketentuan upah minimum dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Upah UMK ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, kesepakatan itu didasarkan pada dua acuan: 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi atau minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi. Untuk ilustrasi, jika memiliki UMK(M) di Jakarta, maka Anda bisa membayar karyawan dengan gaji Rp 1.525.000 (50% dari rerata konsumsi masyarakat DKI Jakarta sebesar Rp 3.050.000) atau Rp 1.031.610 (25% di atas garis kemiskinan DKI sebesar Rp 825.288). Maka, beleid tersebut bukan meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan pemerintah malah melegitimasi rezim upah murah.

Di saat lapangan kerja didominasi sektor informal, pemerintah pusat yang memerlukan dana baru untuk program pembangunan pada periode selanjutnya mulai berancang-ancang membuka kran pemasukan baru. Sialnya, yang harus menanggung beban itu adalah kelas pekerja, tidak peduli apakah dia merupakan pekerja formal maupun informal. Pada tahun ini, pemerintah sudah memutuskan bahwa negara akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang awalnya 11 persen menjadi 12 persen, kebijakan ini rencananya efektif berjalan pada tahun 2025. Naiknya PPN ini tentu akan berdampak pada beberapa sektor penting penyangga ekonomi seperti manufaktur, makanan dan minuman, jasa, serta teknologi dan informasi. Dengan peraturan baru itu, perusahaan akan terbebani oleh bertambahnya biaya produksi dan jasa. Perubahan ongkos

³⁵ Mika Sudira (2024). “‘Bangga Buatan Indonesia’: Beli, Konsumsi, Lupakan Burugnya.” *Indoprogress*. Retrieved September 7, (<https://indoprogress.com/2023/07/bangga-buatan-indonesia-beli-konsumsi-lupakan-buruhnya/>).

³⁶ Maria Monica Wihardja and Wendy Cunningham. (2021). *Langkah Menuju Pekerjaan Kelas Menengah di Indonesia*. Washington D.C.: World Bank.

produksi akan otomatis menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas yang membuat minat dan perilaku konsumen ikut berubah, dalam hal ini penurunan konsumsi. Seolah tak kehilangan akal, pada pertengahan tahun 2024 pemerintah mengeluarkan kebijakan kontroversial lainnya, yakni Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Lewat mekanisme TAPERA, pekerja diwajibkan mengikuti program itu, yang akan memotong pendapatan mereka sebesar 2,5 % per bulan. Bagi pekerja, kebijakan ini sangat memberatkan karena (a) gaji mereka sudah banyak terpotong untuk kebutuhan iuran kebijakan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan serta pajak penghasilan dan (b) opsi kredit rumah sudah ada dalam bentuk JHT BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran TAPERA, alih-alih menjadi solusi, hanya akan memperberat beban kelas pekerja. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi pekerja belakangan ini.

Akademisi dan Navigasi Jalan Perubahan

Bila menyimak situasi polikrisis di atas, setiap "akademisi sejati" (bukan pengidap *fear of freedom*) tentu tidak akan bisa tinggal diam. Sebagai kelompok cerdas cendikia, kaum akademisi memiliki tanggung jawab ke-publik-an untuk semesta hidup, penghidupan, dan kehidupan warga, utamanya kaum terbungkam, terlecehkan, tersingkir, tertindas, terjajah, dan terjarah. Jati diri "akademisi sejati" dibentuk dari pembelajaran yang datang dari mereka yang tertindas sendiri dan dari siapapun yang benar-benar bersolidaritas dengan mereka. Tanggung jawab "akademisi sejati" adalah manifestasi dari praktik etis (*ethics*) dan moralitas untuk berbela-rasa dan berpihak pada kaum terjajah. Tidak banyak akademisi yang mampu mencapai tanggung jawab ini. Terlebih saat kita menyaksikan keterlibatan mereka dalam tata kelola pemerintahan di republik ini. Sebagian melacurkan diri dalam praktik korupsi-kolusi-nepotisme, sebagian lainnya pro aktif berkomplot dalam *think tank* kejahatan-penghancuran konstitusi dan ketatanegaraan. Namun demikian, masih banyak "akademisi sejati" di republik ini yang tetapi berani menjadi pelaku dan penyeru kebenaran (*parrhesiastes*).

Menilik jauh seabad silam, Antonio Gramsci (1926) telah mengatakan tentang pentingnya peran seorang intelektual organik. Baginya, sebagai intelektual yang tidak terpisahkan di dalam masyarakat, intelektual organik memiliki peran untuk mengarahkan ide-ide dan aspirasi kelas di mana mereka menjadi bagian darinya.³⁷ Ini menjadi titik tolak atas pentingnya kesadaran bahwa akademisi bukanlah suatu entitas yang terpisah dari masyarakat, namun bagian dari masyarakat itu sendiri. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa tugas akademisi bukanlah untuk melakukan pembenaran dan dukungan terhadap hal-hal yang bersifat pragmatis, melainkan untuk keberlangsungan kehidupan

³⁷ Antonio Gramsci. (1992). *Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci*, International Publishers. New York. Quintin Hoare & Geoffrey Nowell Smith

umat manusia dan lingkungan secara keseluruhan. Meski patut disadari, akademisi bukanlah sang juru selamat (*messiah*) yang mampu menyelamatkan segalanya melalui tangannya sendiri. Ia harus bergabung bersama dengan gerakan akar rumput untuk membangun koalisi permanen yang kritis terhadap kekuasaan dalam rangka menegakkan kelestarian dan kesetaraan sosial, ekologi, dan ekonomi.

Dalam rangka inilah, tawaran akan pentingnya mewujudkan demokrasi inklusif menjadi penting untuk dipertimbangkan. Kemunculan polikrisis yang hadir saat ini sebenarnya menunjukkan bahwa dinamika ekonomi pasar dan “demokrasi perwakilan” telah menyebabkan konsentrasi kekuasaan di berbagai tingkatan yang ada saat ini, yang pada gilirannya merupakan penyebab utama krisis di setiap dimensi.³⁸ Dalam merespons hal ini, Takis Fotopoulos menawarkan empat komponen kunci demokrasi inklusif untuk menghadapi polikrisis yang dihadapi umat manusia dewasa ini: demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan demokrasi ekologi.³⁹ Demokrasi politik berarti kembalinya kekuatan “*demos*” untuk mengatur dan menentukan kebijakan politik. Demokrasi ekonomi mendorong akan pentingnya masyarakat untuk menentukan kegiatan ekonominya sendiri tanpa adanya eksploitasi ekonomi. Demokrasi sosial yang menjunjung kesetaraan di seluruh level komunitas di masyarakat bahkan terkecil sekalipun. Serta, demokrasi ekologi yang bertujuan untuk menciptakan manusia yang terintegrasi dengan lingkungan. Oleh karenanya, kolaborasi lintas sektor menjadi kewajiban yang tak bisa dihindari. Ada beberapa peran yang bisa dilakukan akademisi untuk mewujudkan agenda demokrasi yang inklusif di masa krisis ini.

Agenda pertama, menanam kembali (*re-embedding*) nilai-nilai demokrasi. Tak bisa dipungkiri, regresi demokrasi saat ini merupakan manifestasi dari krisis kapitalisme sebagai wujud dari konsentrasi kekuasaan yang menjadi tantangan penting bagi seluruh warga negara. Oleh karenanya, tugas pertama akademisi berkaitan dengan hal ini adalah menanam kembali atau mengakarkan kembali nilai-nilai demokrasi yang menghadapi beberapa tantangan penting: *Pertama*, ancaman primordialisme. Kemunculan sentimen etnis, agama, dan kedaerahan di berbagai daerah telah menimbulkan konflik horizontal yang terjadi di mana-mana dan sayangnya berhasil mengaburkan realita konflik struktural saat ini. Mulai dari maraknya gerakan populisme agama yang dibarengi dengan gerakan vigilante yang mengancam kebebasan beragama

³⁸ Takis Fotopoulos. (1997). *Towards an Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need for a Liberatory Project*. London. Cassel.

³⁹ Takis Fotopoulos. (1997). *Towards an Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need for a Liberatory Project*. London. Cassel. Takis Fotopoulos. (2005). *Inclusive Democracy as a Way Out of the Present Multi-dimensional Crisis*. *The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY*, Vol. 2. No. 3.

bagi setiap individu,⁴⁰ konflik etnis,⁴¹ ataupun kehadiran gerakan-gerakan kekerasan kedaerahan lain. Kedua, ekstremisme agama yang hadir dalam berbagai macam bentuk kekerasan dan terorisme yang secara terang-terangan menolak demokrasi dan menghardik pluralitas.⁴² Ketiga, budaya klientelisme yang memunculkan patron-patron dalam berbagai bentuk yang menggalang dukungan dan loyalitas kliennya untuk mendorong terjadinya politik uang serta korupsi, kolusi, dan nepotisme.⁴³ Keempat, fundamentalisme pasar yang mendorong sifat-sifat *homo economicus* yang individual melalui neoliberalisme di dalam berbagai sektor. Kelima, ancaman disrupsi digital yang terwujud dalam berbagai kerentanan individu di dalamnya.⁴⁴

Semua masalah di atas memiliki akar yang sama: bibit-bibit anti-demokrasi yang berbahaya bagi masa depan kehidupan. Menjadi tugas penting bagi para akademisi saat ini untuk merangkul kembali demokrasi dalam berbagai sektor kehidupan. Mendemokratisasi dalam hal ini berarti mengurangi konsentrasi kekuasaan yang ada dan mendorong individu untuk memiliki kekuasaan dalam menentukan keinginannya sendiri.⁴⁵ Namun, kebebasan ini bukan berarti kebebasan untuk mengeksploitasi kelompok lain sebagaimana yang dibayangkan kelompok liberal yang membayangkan kebebasan ekonomi. Demokratisasi harus diartikan sebagai upaya untuk mendistribusikan kekuasaan secara merata dan adil agar tidak berfokus pada satu kekuatan-kekuatan elit tertentu yang tidak proporsional dan tidak dapat diakses oleh seluruh pihak.⁴⁶ Di sinilah peran untuk merebut kembali ruang publik—sebagaimana Habermas katakan—menjadi penting sebagai langkah awal untuk mengurangi konsentrasi kekuatan yang dikuasai oleh kelompok pemilik kapital.⁴⁷ Reproduksi ruang yang selama ini dilakukan oleh para kapitalis telah terbukti gagal dengan banyaknya konflik dan ketimpangan sosial-ekonomi yang terjadi. Para akademisi harus hadir

⁴⁰ Vedi R. Hadiz. *Imagine All the People? Mobilising Islamic Populism for Right-Wing Politics in Indonesia.* *Journal of Contemporary Asia*, 48(4), 566–583. <https://doi.org/10.1080/00472336.2018.1433225>

⁴¹ Edward Aspinal. (2011). Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine Theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289–319. <http://www.jstor.org/stable/23418840>

⁴² Vedi R. Hadiz, & Richard Robison. (2017). Competing populisms in post-authoritarian Indonesia. *International Political Science Review / Revue Internationale de Science Politique*, 38(4), 488–502. <https://www.jstor.org/stable/26940306>

⁴³ Aspinal, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia.* Cornell University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphq>

⁴⁴ Indonesia for Global Justice. 2018. Digital Economic, Hope, and Threats: Lesson from Indonesia

⁴⁵ Takis Fotopoulos. Inclusive Democracy as a Way Out of the Present Multi-dimensional Crisis. 2006. *The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY*, Vol. 2. No. 3

⁴⁶ Takis Fotopoulos. (1997). *Towards an Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need for a Liberatory Project.* London. Cassel.

⁴⁷ Jurgen Habermas. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* (translated by Thomas Burger with the assistance of Frederick Lawrence), Massachusetts: The MIT Press.

untuk bersama-sama dengan masyarakat mengantisipasi kemunculan gerakan-gerakan kontra revolusioner di ruang publik yang berlawanan dengan prinsip demokrasi. Tentu demokrasi bukan hanya tentang pemilu yang bersifat formalitas belaka sehingga justru bersifat iliberal seperti yang kita lihat saat ini.⁴⁸ Namun, lebih dari itu, demokrasi adalah tentang keputusan-keputusan bersama yang ditujukan demi kesejahteraan bersama. Penciptaan ruang-ruang dialog yang inklusif, pengedukasian tentang pentingnya partisipasi aktif masyarakat, dan pengkritisan bibit-bibit anti-demokrasi yang muncul di berbagai lini kehidupan: kebijakan pemerintah, praktik bisnis, maupun praktik-praktik budaya feodalisme yang hingga saat ini masih terasa kental di lingkungan masyarakat menjadi hal yang harus bersama-sama dilawan oleh para akademisi sebagai bagian dari masyarakat sipil sebagai langkah awal untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif bagi seluruh elemen.

Pendidikan politik menjadi kunci bagi bangkitnya gerakan politik kewargaan yang selama ini dikooptasi oleh anasir-anasir yang menggerogoti demokrasi. Pembangunan kesadaran politik akan pentingnya demokrasi tentu bukan hal yang mudah untuk saat ini. Kampus yang saat ini menjadi tempat yang tidak dapat diakses semua orang akibat neoliberalisasi,⁴⁹ harus menggeser kembali posisinya sebagai bagian dari politik perjuangan rakyat yang turut bersama-sama membangun blok politik kritis yang kokoh dan persisten. Sekat yang membatasi kampus dan rakyat sudah seharusnya dihilangkan. Ini bisa dilakukan dengan melakukan riset sebagai salah satu jalan pendidikan politik rakyat, sebab hanya dengan risetlah integrasi secara langsung di tengah-tengah rakyat akan terjamin karya yang mendalam dan realistik.⁵⁰ Sebab itulah, riset-riset sudah seharusnya kembali melibatkan rakyat dengan menggunakan metode kerja ilmiah dan kerakyatan sebagaimana dahulu rakyat menggalakkan konsep yang kini kita kenal sebagai *Participatory Action Research*⁵¹ sebagai wujud dari demokratisasi riset itu sendiri. Pembangkitan, mobilisasi, dan pengorganisasian massa harus didasarkan pada hasil-hasil riset atau kerja-kerja ilmiah yang dilakukan secara bersama-sama.⁵² Tanpanya, riset hanya akan menjadi kerja-kerja intelektual menara gading yang sibuk dengan kepentingan

⁴⁸ David Bourchier. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203379721>

⁴⁹ Inaya Rakhmani. (2019). "Reproducing Academic Insularity in a Time of Neo-Liberal Markets: The Case of Social Science Research in Indonesian State Universities." *Journal of Contemporary Asia* 51 (1): 64–86. doi:10.1080/00472336.2019.1627389.

⁵⁰ Dipa Nusantara Aidit (1964). *Tentang Sastra dan Seni*. Jakarta: Yayasan Pembaruan.

⁵¹ Ben White (2016) Remembering the Indonesian Peasants' Front and Plantation Workers' Union (1945–1966), *The Journal of Peasant Studies*, 43:1, 1-16, DOI: 10.1080/03066150.2015.1101069

⁵² Dipa Nusantara Aidit (1964). *Kaum Tani Mengganjang Setan-setan Desa*. Jakarta. Yayasan Pembaruan

pribadi. Oleh karenanya, prinsip politik sebagai panglima⁵³ menjadi kunci rakyat untuk memahami eksploitasi ekonomi politik rakyat yang terjadi saat ini. Sebab, semua hal adalah politis, termasuk riset-riset yang harus berani menunjukkan keberpihakannya pada mereka yang tertindas. Dengan cara inilah, ilmu dapat berguna sebagai *elmu*, yaitu ilmu yang memungkinkan rakyat mengatasi kondisi keterjajahannya.⁵⁴

Agenda kedua, meradikalisasi humaniora digital kritis. Langkah kedua yang harus dilakukan oleh para akademisi adalah mendorong dan meradikalisasi humaniora digital kritis untuk menghadapi disrupsi sosial teknologis.⁵⁵ Di sini, tugas kaum humanis adalah untuk senantiasa mempersoalkan dimensi kultural, subyektif, dan historis dari operasi-operasi dan alat-alat yang sering dianggap murni teknis dan mekanis⁵⁶ yang mudah tersandera dalam perangkat rasionalitas instrumental dan kesadaran palsu. Oleh karenanya, dalam konteks ini, digital bisa diartikan sebagai alat yang mampu dibajak untuk misi membebaskan manusia dari penindasan, alih-alih sepenuhnya sebagai alat yang mengontrol manusia.

Kita mesti menyadari bahwa kegagalan transformasi ekonomi dari ekonomi agraris menjadi ekonomi industri yang dipadukan dengan kebijakan negara yang berorientasi neoliberalisme telah memicu munculnya pasukan cadangan tenaga kerja yang melimpah.⁵⁷ Alih-alih melakukan industri manufaktur terlebih dahulu, pemerintah justru meloncat menuju industri jasa dengan iming-iming digitalisasi. Janji kebebasan dan fleksibilitas yang dibawakan oleh digitalisasi di berbagai sektor kehidupan tidak semanis yang dibayangkan. Bahkan, terma-terma ini tak lebih dari pengaburan bentuk eksploitasi yang kita sebut sebagai *flexploitation*. Munculnya disrupsi digital dalam berbagai bentuk menjadi akibatnya. Bentuk-bentuk eksploitasi baru yang tak pernah ada

⁵³ Njoto. (1959). Revolusi adalah Api Kembang, dalam *Dokumen Kongres Nasional Pertama Lembaga Kebudajaan Rakjat* (Solo, 22-28 Djanuari 1959). Bagian Penerbitan Lembaga Kebudajaan Rakjat.

⁵⁴ Ruth McVey (1990). Ruth McVey. "Teaching Modernity: The PKI as an Educational Institution." *Indonesia*, no. 50, 1990, pp. 5–27. *JSTOR*, <https://doi.org/10.2307/3351228>.

⁵⁵ Apresiasi dan penghormatan untuk Prof. Dr. Heru Nugroho yang telah merespons krisis disrupsi digital saat ini dengan menginisiasi konsentrasi studi "Humaniora Digital Kritis" pada Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UGM sejak tahun 2023.

⁵⁶ James E. Dobson (2019). *Critical Digital Humanities: The Search for a Methodology*. University of Illinois Press. <https://doi.org/10.5406/j.ctvfjd0mf>

⁵⁷ Muchtar Habibi & Benny Hari Juliawan. (2018) 'Creating surplus labour: Neo-liberal transformations and the development of relative surplus population in Indonesia', *Journal of Contemporary Asia*, 48 (4):649–70

sebelumnya seperti *precariat*,⁵⁸ *cybertariat*,⁵⁹ atau *cognitariat*⁶⁰ muncul dan secara brutal menggilas kehidupan manusia modern. Kerja-kerja temporer yang dipenuhi ketidakpastian akhirnya berdampak pada kondisi rentan bagi para pekerjanya.⁶¹ Mereka dipekerjakan secara informal, sehingga tidak mendapatkan perlindungan dari negara untuk memastikan mereka dapat memperoleh hak-hak pekerja, seperti upah minimum, waktu kerja yang layak, hak liburan, dan jaminan sosial⁶². Belum lagi jika membicarakan tentang pencurian data yang muncul dari sifat *surveillance capitalism* yang mengumpulkan data-data masyarakat untuk melakukan pengawasan dengan menggunakan logika algoritma yang timpang antara pengguna dan industri teknologi.⁶³ Sayangnya, sekali lagi, pemerintah abai dalam melihat kemunculan berbagai hal ini dan justru berbalik arah menjadi sponsor utama kerentanan-kerentanan yang dialami oleh pekerja digital. Dorongan kerentanan oleh pemerintah ini sendiri tak lepas dari kecenderungan sikap pemerintah yang semakin hari semakin menunjukkan sikap keantiannya pada sains dan ilmu pengetahuan.

Menjadi suatu hal yang penting bagi para akademisi untuk memberikan rekognisi kepada subjek-subjek marjinal dalam dunia yang serba digital saat ini. Sebab, hubungan sosial sendiri hanya memungkinkan menjadi sehat ketika dibangun di atas rekognisi yang setara dan adil.⁶⁴ Banyaknya distorsi akibat logika kapital yang masuk dalam ruang publik digital ini menjadi hal yang harus diatasi untuk mencapai rekognisi. Dalam hal ini, karya-karya humanis harus didorong untuk berkembang melampaui sekadar penanganan data, teks atau informasi digital. Sebaliknya, mereka juga harus terbuka terhadap berbagai interpretasi dan pendekatan teks dilakukan bukan hanya sebagai informasi, tetapi untuk memeriksa makna teks dalam kaitannya dengan sejarah, politik, dan ideologi.⁶⁵ Lewat cara inilah, pembangunan kesadaran kritis akan teknologi digital bisa dilakukan, karena dalam era kapitalisme digital saat ini, keberadaan teknologi bukanlah hal yang dapat begitu saja dipisahkan dari logika ekonomi

⁵⁸ Guy Standing. (2014). The Precariat. Contexts, 13(4), 10-12. <https://doi.org/10.1177/1536504214558209>

⁵⁹ Ursula Huws. (2014). *Labor in the Global Digital Economy: The Cybertariat Comes of Age*. NYU Press. <http://www.jstor.org/stable/j.ctt1287j8b>

⁶⁰ Franco Berardi (2013). What does Cognitariat Mean? Work, Desire and Depression. *Cultural Studies Review* 11 (2).

⁶¹ Lily Kong (2014). From cultural industries to creative industries and back? Towards clarifying theory and rethinking policy. *Inter-Asia Cultural Studies*, 15(4), hal. 593-607

⁶² Arif Novianto, Anindya Dessi Wulansari and Yereimias T. Keban. (2023). Searching for a better job. *Work Organisation, Labour & Globalisation*. Vol. 17(2):71-90. DOI: 10.13169/workorglaboglob.17.2.0071

⁶³ Shoshana Zuboff. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York: Public Affairs.

⁶⁴ Axel Honneth. (1992). *The Struggle for Recognition: The Moral Grammars of Social Conflicts*

⁶⁵ James E. Dobson (2019). *Critical Digital Humanities: The Search for a Methodology*. University of Illinois Press. <https://doi.org/10.5406/j.ctvfjd0mf>

dan politik. Melihat siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan adalah gerbang utamanya. Empat pertanyaan ekonomi-politik Bernstein berupa *siapa memiliki apa, siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan itu*⁶⁶ menjadi relevan untuk membaca kondisi eksploitasi di era digital dewasa ini. Mulai dari eksploitasi para pekerja digital hingga bagaimana praktik pemusatan kekuasaan oleh negara yang otoriter berkolaborasi dengan pemusatan kekuasaan digital saat ini telah menghasilkan berbagai macam misinformasi, *buzzer*, provokasi, dan *hate speech* yang telah mengambil alih ruang publik digital. Ujungnya, konsentrasi kekayaan oleh segelintir elit melalui penguasaan data pribadi masyarakat.⁶⁷ Sebab itulah, penting bagi akademisi untuk bersama-sama melakukan perebutan kembali ruang-ruang publik digital dari logika kapital di balik balik mesin-mesin algoritmik yang mendikte berbagai aktivitas hidup keseharian. Sebab, ia merupakan ruang publik yang dibatasi akibat terstruktur oleh kelas.⁶⁸ Ruang publik digital sudah seharusnya menjadi media komunikasi politik publik yang dengannya masyarakat dapat belajar, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam politik.⁶⁹

Agenda ketiga, memformasi subyek ekologis yang melek dan peka atas dominasi *Anthropocene* dan *Capitalocene*. Masalah ekologi saat ini pun tak kalah peliknya dari masalah lainnya. Sejumlah masalah yang muncul tak bisa dilepaskan dari kepentingan para oligarki yang berusaha melakukan akumulasi kapital lewat bisnis-bisnis ekstraktif yang menyingkirkan dan mengkriminalisasi masyarakat adat demi kelancaran akumulasi primitifnya. Tak heran jika pembangunan Indonesia saat ini merupakan kepanjangan dari sistem rezim ekstraktif yang mengandalkan ekstraksi sumber daya alam yang membentuk dasar produksi dan akumulasi nilai.⁷⁰ Tentu saja ini bukanlah sistem yang berkelanjutan atau lestari bagi masa depan lingkungan.

Oleh karenanya, sudah tiba waktunya bagi akademisi–bersama dengan rakyat–untuk mendorong masa depan lingkungan dengan mengedepankan keberlanjutan. Tekel (*tackle*) pertama tentu saja harus diarahkan pada sistem akumulasi yang terkonsentrasi pada kepentingan dominan manusia. Sebab, krisis ekologi saat ini adalah hasil dari sentralisasi dinamika kekuasaan sistem ekonomi

⁶⁶ Henry Bernstein. (2010). *Class Dynamics of Agrarian Change*. Fernwood Publishing. Canada

⁶⁷ Shoshana Zuboff. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York: Public Affairs

⁶⁸ Jurgen Habermas. (1991). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*, Massachusetts: The MIT Press.

⁶⁹ Christian Fuchs. (2023). *Digital Democracy and the Digital Public Sphere: Media, Communication, and Society*. New York: Routledge.

⁷⁰ Paul K. Gellert. (2010). Extractive regimes: toward a better understanding of Indonesian development. *Rural Sociology*, 75(1), 28-57.

pasar dan dominasi kekuatan manusia pada alam.⁷¹ Hasilnya adalah bentuk eksploitasi lingkungan dan pekerja di bawah sistem kapitalisme.⁷² Tawaran untuk mendemokratisasi kehidupan ekologi merupakan jalan untuk mewujudkan masa depan lingkungan yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan sudah seharusnya tidak lagi terpusat pada kekuatan sentral di bawah rezim sentral dengan akumulasi primitifnya. Hal ini tentu saja membutuhkan alternatif kekuatan organisasi sosial yang didasarkan pada distribusi politik dan ekonomi yang setara dan proses desentralisasi yang radikal dalam produksi, konsumsi, dan dalam kehidupan itu yang membutuhkan perubahan sistemik mendalam alih-alih hanya perubahan teknologi atau nilai.⁷³ Perubahan juga harus terjadi pada cara memandang dunia saat ini. Bagi Moore, yang tidak boleh dilakukan adalah memandang dunia dengan apa yang disebut sebagai “narasi Cartesian”, karena berdasarkan pandangan ini, hal-hal sosial muncul dari alam dan dianggap akan mendisrupsi dari luar, singkatnya alam menjadi hal eksternal yang kemudian menjadi tumbal dari tindakan sosial.⁷⁴ Pandangan dunia inilah yang kemudian menjadikan hal mendasar bagi kekerasan yang dilakukan oleh kapitalisme.

Perebutan ruang-ruang ekologis dewasa ini merupakan pertarungan antara keberlangsungan kehidupan atau kepunahan lingkungan secara masif. Baik pandangan *anthropocene*⁷⁵ maupun *capitalocene*⁷⁶ saat ini telah menunjukkan kegagalannya dalam mempertahankan masa depan lingkungan. Eksploitasi yang dilakukan oleh kapitalisme sejak awal kemunculannya telah mendapatkan sokongan dengan mengeksploitasi alam dan pekerja. Ini setidaknya menunjukkan bagaimana perubahan teknis saja tidaklah cukup untuk menyelamatkan bumi. Perubahan teknis hanya akan menggerakkan kuda troya berbentuk *green capitalism* – yang mengkomodifikasi alam – tetap akan melakukan eksploitasi karena logika dorongan untuk mendapatkan keuntungan.⁷⁷ Mendorong kembali pandangan persatuan hubungan antara alam dan manusia adalah suatu keharusan yang bisa dilakukan untuk merestorasi kejahatan terhadap lingkungan yang terjadi hingga saat ini. Penggabungan ide-ide keadilan ekologis, hak asasi

⁷¹ Takis Fotopoulos. Inclusive Democracy as a Way Out of the Present Multi-dimensional Crisis. 2006. The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY, Vol. 2. No. 3.

⁷² John Bellamy Foster. (1999). Marx's theory of metabolic rift: Classical foundations for environmental sociology. *American Journal of Sociology*, 105(2), 366–405. <https://doi.org/10.1086/210315>

⁷³ Takis Fotopoulos. Inclusive Democracy as a Way Out of the Present Multi-dimensional Crisis. 2006. The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY, Vol. 2. No. 3.

⁷⁴ Jason W. Moore (2015) *Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital*. London: Verso.

⁷⁵ Kohei Saito. (2022) *Marx in the Anthropocene: Towards the Idea of Degrowth Communism*. Cambridge: Cambridge University Press

⁷⁶ Jason W. Moore (2016). *Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism*. Michigan: PM Press.

⁷⁷ Daniel Tanuro (2014). *Green Capitalism: Why It Can't Work*. Canada: Fernwood Publishing.

manusia, dan keberlanjutan lingkungan harus dipilih sebagai respon terhadap kapitalisme neoliberal yang telah merusak dan menguras habis lingkungan. Perubahan paradigma menjadi hal yang penting tak hanya dalam rangka untuk melindungi alam, tapi juga mendorong keadilan sosial.⁷⁸ Tawaran sistem eko-feminisme dan eko-sosialisme dapat dipilih sebagai jalan keluar sistem yang tidak eksploitatif, baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Lewat pandangan semacam Demokrasi Bumi oleh Vandana Shiva sebagai wujud konkret demokrasi inklusiflah, ekonomi yang berkelanjutan dapat hadir sebagai proses dan ruang di mana sumber daya bumi dibagi secara adil untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air kita serta menciptakan kehidupan yang bermakna.⁷⁹

Kini tibalah saatnya kaum akademisi mengambil tanggung jawab atas kontribusinya pada sesat-pikir dan sesat-jalan peradaban hidup bersama di republik ini. Urgensi bagi para akademisi meniti jalan pertobatan sosial demi bangkitnya subyek-subyek politik kewargaan untuk mengontrol ekksesifnya konsentrasi kuasa elit oligarki di segenap arena kehidupan: politik, ekonomi, sosial, dan ekologis. Boleh jadi, petatah-petitih dari film *Twelve Years a Slave* berikut ini relevan untuk menemani para akademisi berkontemplasi: "Hidup adalah sesuatu yang berharga bagi setiap makhluk hidup, hingga cacing yang merayap di tanah pun akan berjuang untuk mendapatkannya."⁸⁰ Bertumpu pada daya-daya yang meneguhkan politik harapan itulah, ungkapan Paulo Freire mendapati konteks dan relevansinya saat ini: "Pengetahuan hanya lahir melalui usaha penemuan dan penemuan ulang, melalui pencarian manusia yang gelisah, tidak sabar, terus menerus dan penuh harapan di dunia, dengan dunia, dan bersama orang lain."⁸¹ Hanya melalui gerak sirkular di rute pembebasan itulah, kita bisa berharap, nilai-nilai moral, etika, integritas keilmuan, kebenaran, dan keadilan yang terkandung Nilai-Nilai Ke-UGM-an kembali termanifestasikan di republik ini. Dirgahayu Fisipol UGM yang ke-69!

⁷⁸ David Harvey (1997). *Justice, Nature and the Geography of Difference*. Wiley-Blackwell

⁷⁹ Vandana Shiva (2005) *Earth Democracy: Justice, Sustainability, and Peace*. California: North Atlantic Books.

⁸⁰ Solomon Northup (2013). *Twelve Years a Slave*. Regency Enterprises

⁸¹ Paulo Freire (2005). *Pedagogy of the oppressed*. London and New York: The Continuum